

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PIDIE TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM



Disusun Oleh:

**ANNISA HUMAIRA
NIM. 200602108**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Annisa Humaira
NIM : 200602108
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Yang Menyatakan



Annisa Humaira

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Analisis Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Dan
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pidie Terhadap Penurunan
Angka Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Annisa Humaira
NIM. 200602108

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 09 Agustus 2024 M
08 Safar 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

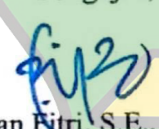
Sekretaris,


Dr. Hendra Syahputra, MM.
NIP. 197610242009011005


Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

Penguji I,

Penguji II,


Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002


Mursalmima, M.E.
NIP. 199211172020121011

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec/
NIP. 198006252009011009

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi di Prodi Ekonomi
Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Dan
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pidie Terhadap Penurunan
Angka Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Diajukan Oleh:
Annisa Humaira
NIM. 200602108

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi
Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 15 Juli 2024

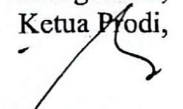
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hendra Syahputra, MM.
NIP. 197610242009011005


Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Annisa Humaira
NIM : 200602108
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 200602108@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

“Analisis Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pidie Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Agustus 2024

Penulis

Annisa Humaira
NIM. 200602108

Mengetahui
Pembimbing I

Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Proposal skripsi dengan judul **“Analisis Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pidie Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, ME selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Sekaligus Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Satu (S1) Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Hendra Syahputra, MM selaku pembimbing I dan Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Samsul Bahri dan Ibunda Nurlaili serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, do'a, serta motivasi yang tiada henti-hentinya agar penulis dapat memperoleh yang terbaik dan tidak dapat ternilai bahkan terbalaskan.
7. Kepada teman-teman dari prodi Ekonomi Syariah leting 2020 khususnya teman-teman yang ada di ruangan kaca dan juga beberapa rekan alumni MUQ yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam berbagai aspek, mulai dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki kekurangan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penulis berkontribusi pada hal tersebut. Penulis berharap segala upaya yang dilakukan dapat dianggap sebagai bentuk ibadah dan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, dan mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin timbul, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Banda Aceh, 15 Juli 2024
Penulis,

Annisa Humaira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haul : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Annisa Humaira
NIM : 200602108
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pidie Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Hendra Syahputra, MM
Pembimbing II : Intan Qurratulaini, S. Ag., M.S.I

Dalam Islam pendapatan suatu daerah didasarkan pada prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk mencapai fahlah, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan *maqasid al-shariah* di suatu daerah dapat diukur melalui seberapa baik pendapatan daerah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Penelitian ini mengkaji pengaruh Transfer Ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk melihat analisis penggunaan Transfer Ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pidie terhadap Penurunan angka kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam. Data yang digunakan adalah data jumlah realisasi penerimaan Transfer Ke Daerah (TKD), jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan persentase kemiskinan di Kabupaten Pidie dengan rentang waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan PAD berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan. Uji simultan menunjukkan variabel TKD dan PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie.

Kata Kunci : Transfer Ke Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kemiskinan

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat.....	17
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	17
1.4.2 Manfaat Praktis.....	17
1.4.3 Manfaat Kebijakan	18
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	18
1.6 Sistematika Pembahasan	18
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 21
2.1 Transfer Ke Daerah	21
2.1.1 Dana Bagi Hasil.....	22
2.1.2 Dana Alokasi Umum	29
2.1.3 Dana Alokasi Khusus	33
2.2 Pendapatan asli Daerah.....	35
2.2.1 Defenisi Pendapatan Asli Daerah.....	35

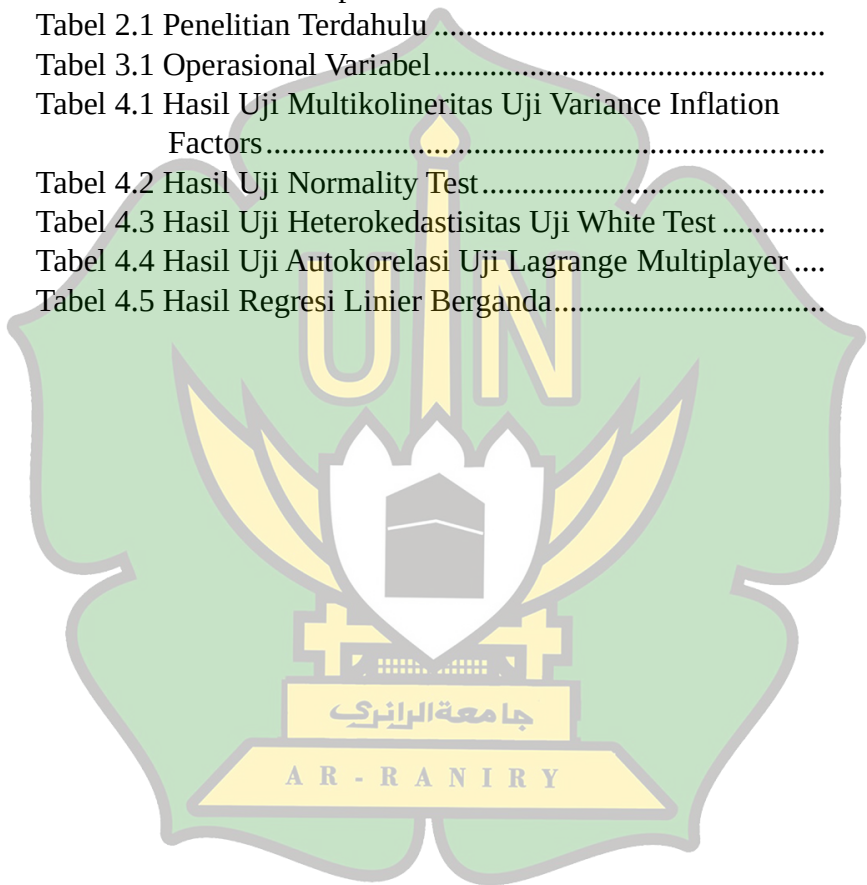
2.2.2	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	37
2.3	Kemiskinan.....	43
2.3.1	Pengertian Kemiskinan.....	43
2.3.2	Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	44
2.3.3	Indikator Kemiskinan	46
2.3.4	Dampak Kemiskinan	49
2.3.5	Langkah-Langkah Pengentasan Kemiskinan.....	49
2.3.6	Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	50
2.4	Ekonomi Islam.....	51
2.4.1	Pengertian Ekonomi Islam	51
2.4.2	Prinsip-prinsip dalam ekonomi islam.....	52
2.4.3	Konsep Masalahah dalam Ekonomi Islam	55
2.5	Penelitian Terkait.....	56
2.6	Kerangka Berpikir	69
2.7	Hipotesis.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....		72
3.1	Jenis Penelitian.....	72
3.2	Jenis Data.....	72
3.3	Teknik Pengumpulan Data	72
3.4	Operasional Variabel.....	73
3.5	Metode Analisis.....	75
3.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	76
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	77
3.6	Pengujian Hipotesis.....	79
3.6.1	Uji t (Uji Parsial)	79
3.6.2	Uji F (Uji Simultan).....	80
3.6.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		82
4.1	Statistika Deskriptif	82
4.1.1	Kemiskinan.....	82
4.1.2	Transfer Ke Daerah	83

4.1.3	Pendapatan Asli Daerah.....	85
4.2	Pengujian dan Hasil Penelitian.....	86
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	87
4.2.2	Uji Hipotesis.....	90
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	94
4.3.1	Pengaruh Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pidie.....	95
1.3.2	Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	99
BAB V PENUTUP		108
5.1	Kesimpulan.....	108
5.2	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN		116



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten Pidie.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah Kabupaten Pidie.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	65
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	75
Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolineritas Uji Variance Inflation Factors.....	87
Tabel 4.2 Hasil Uji Normality Test.....	88
Tabel 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Uji White Test	89
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Uji Lagrange Multiplayer	90
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda.....	91



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	70
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie.....	83
Gambar 4.2 Transfer Ke Daerah Kabupaten Pidie	84
Gambar 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie	86



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian.....	69
Lampiran 2 Uji Multikolineritas.....	69
Lampiran 3 Uji Normalitas.....	69
Lampiran 4 Uji Heterokedastisitas	70
Lampiran 5 Uji Autokorelasi	70
Lampiran 6 Regresi Linier Berganda	70
Lampiran 7 Riwayat Hidup	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ekonomi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai standar hidup yang umumnya diharapkan dalam masyarakat suatu daerah (Rasu *et al.*, 2019). Kemiskinan sering kali mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang memadai. Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dengan salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh (Gani, 2022). Kebutuhan manusia yang beragam merupakan penyebab terjadinya kemiskinan, karena kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, garis pengukuran kemiskinan dapat dibuat dengan berbagai cara, salah satunya dengan melihat kebutuhan papan masyarakat, atau tempat tinggal. Seorang penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021).

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipenuhi atau dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal seperti ini berhubungan dengan kualitas hidup (Arfiani, 2019). Dalam

menangani fenomena ini, telah banyak program bantuan yang disalurkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan mulai dari memberi bantuan dana sosial kepada masyarakat miskin, memberikan layanan kesehatan cuma-cuma, pendidikan gratis dan beasiswa, hingga pemberian subsidi terhadap beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat (Aryani & Rachmawati, 2019). Kemiskinan termasuk salah satu masalah sosial yang memerlukan pengkajian secara khusus dalam mencari strategi pengentasannya, karena merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Baik negara maju maupun negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinan di negara maju tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Kemiskinan di Indonesia sebagian besar terjadi di pedesaan, bukan hanya di kota-kota besar.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga tak lepas dari problematika kemiskinan yang melanda. Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara. Kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan per Maret 2023 berada di sekitar 9,71%, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pandemi COVID-

19 telah menyebabkan peningkatan sementara pada angka kemiskinan karena dampak ekonomi yang luas.

Provinsi Aceh tergolong salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di wilayah Indonesia. Provinsi Aceh memiliki sejumlah 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan luas wilayah mencapai 57.956,00 km². Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Aceh berkisar sekitar 15-17%. Meskipun ada upaya dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi kemiskinan, tantangan yang dihadapi masih signifikan. Salah satu diantara kabupaten yang terdapat di provinsi Aceh yaitu Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie sendiri memiliki 23 kecamatan dan 730 desa, dengan luas wilayah 3.177 km².

Kabupaten Pidie adalah sebuah daerah yang memiliki letak strategis di Provinsi Aceh. Terletak di bagian utara Pulau Sumatra, Pidie memiliki posisi geografis yang penting karena berada di antara beberapa wilayah yang memiliki nilai strategis dalam berbagai aspek. Letak geografis Kabupaten Pidie membuatnya menjadi pintu gerbang utama untuk masuk ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar di sebelah barat, Kabupaten Pidie Jaya di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah utara, dan Kabupaten Aceh Jaya di sebelah selatan. Karena posisinya yang berada di tepi pantai, Pidie memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting di wilayah utara Aceh. Letak strategis Pidie juga

membuatnya menjadi pusat transportasi yang penting di wilayah Aceh bagian utara. Terdapat beberapa jalur transportasi utama yang melintasi Kabupaten Pidie, seperti jalan lintas barat dan jalan lintas timur Sumatra. Hal ini memudahkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah sekitarnya dan meningkatkan konektivitas antar-daerah. Kabupaten Pidie memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dikelilingi oleh lahan pertanian yang subur, terutama di sepanjang lembah sungai, Pidie merupakan salah satu daerah penghasil utama padi, kelapa sawit, dan kopi di Provinsi Aceh. Selain itu, terdapat SDA nonmigas (tambang emas) yang juga menjadi potensi ekonomi penting bagi daerah ini. Namun, di balik itu semua, terdapat realitas bahwa angka kemiskinan Kabupaten Pidie sangatlah tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, informasi mengenai tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie terdapat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Kabupaten Pidie

Tahun	Kemiskinan (%)
2014	20,29
2015	21,18
2016	21,25
2017	21,43
2018	20,47
2019	19,46
2020	19,23
2021	19,59
2022	18,79
2023	18,78

Sumber : BPS (2024)

Berdasarkan data di atas, tercatat Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada periode 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pidie tercatat sebesar 21,43% maka terindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie mengalami peningkatan tertinggi pada periode 2017. Kemudian angka ini mengalami penurunan sebesar 2,65% pada periode 2023, sehingga dapat dikatakan kemiskinan di Kabupaten Pidie mengalami perbaikan dan berada di titik terendah sejak pandemi Covid-19 melanda.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dianggap membawa semangat demokrasi karena memuat kebijakan otonomi daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, undang-undang ini membawa dua hal pokok, adanya otonomi daerah sebagai konsekuensi logis dari penerapan asas desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yang terkandung di dalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 masih memiliki berbagai kekurangan sehingga direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Imam *et al.*, 2023). Otonomi daerah yang juga dikenal dengan desentralisasi fiskal, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik yang layak dan memadai, guna membantu penduduk miskin di kabupaten/kota. Desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin jika disertai dengan kenaikan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi. Daerah yang potensial akan menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang memiliki nilai guna, meningkatkan penjualan, dan menarik minat konsumen. Desentralisasi fiskal tidak hanya dapat mengatasi masalah kemiskinan tetapi juga dapat menjadi pendorong prospek pertumbuhan ekonomi di daerah otonom.

Provinsi Aceh dengan 23 kabupaten/kota merupakan provinsi paling ujung sebelah barat Indonesia yang juga menjadi bagian dalam otonomi daerah sebagai daerah otonomi. Meskipun demikian, provinsi ini juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Salah satunya kabupaten Pidie, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menjelaskan bahwa

tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie masih tinggi meski mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa daerah yang telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah tidak serta merta dapat menyelesaikan problematika di wilayah tersebut, terutama permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah melalui penerapan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan dana yang cukup memadai. Dalam sistem otonomi daerah, keuangan daerah diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber lokal maupun dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri, melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Pada dasarnya PAD berbeda-beda di setiap daerah, tergantung bagaimana kemampuan daerah tersebut dalam menggali pendapatan dan mengolah sumber daya yang ada, sehingga dapat

digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah umumnya meningkat setiap tahun, dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan Tabel 1.2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yang mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya dan aset daerah. Namun, peningkatan PAD ini tidak tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan, yang tetap tinggi di Kabupaten Pidie sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber keuangan daerah juga berasal dari Transfer Ke Daerah, yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Transfer Ke Daerah merupakan dana yang berasal dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) untuk dialokasikan pusat ke daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di daerah (Maria et al., 2021). Transfer Ke Daerah terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer Ke Daerah secara rata-rata di Indonesia terhitung sebesar 80% dari penerimaan daerah.

Transfer Ke Daerah di Kabupaten Pidie mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.2. Di satu sisi, dana tersebut menjadi suntikan modal bagi daerah untuk merealisasikan program-program pembangunan. Namun, di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih kurang. Semakin besar transfer Transfer Ke Daerah yang diterima dari pemerintah pusat, semakin terlihat bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2014-2023

Tahun	DP (Rp)	PAD (Rp)
2014	1.121.517.646.919	166.598.922.670
2015	968.416.475.000	192.642.467.230
2016	1.136.572.837.480	249.489.453.840
2017	1.072.658.698.770	267.608.101.030
2018	1.098.033.955.150	237.201.958.010
2019	1.066.925.649.560	349.717.312.100
2020	1.791.132.340.970	219.573.681.840
2021	1.843.860.436.840	223.787.047.170
2022	1.734.883.467.900	225.594.481.380
2023	1.814.356.398.460	264.181.417.410

Sumber : BPS (2024)

Kabupaten Pidie menerima alokasi Transfer Ke Daerah dan pendapatan asli daerah yang cukup besar, namun terdapat berbagai faktor yang menyebabkan dana tersebut tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan efektif. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pengelolaan dan penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran. Selama ini sebagian besar Transfer Ke Daerah

dan pendapatan asli daerah tersebut seringkali digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih bersifat kosmetik, seperti pembangunan jalan raya atau gedung-gedung pemerintahan yang megah, akan tetapi pemerintah kurang optimal dalam melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Selama satu dekade terakhir pembangunan infrastruktur di Pidie, nyaris satupun tak memiliki izin lingkungan yang sepatutnya telah dilengkapi saat dibuat *Detail Engineering Design* (DED) sebagai proyek perencanaan fisik dan perencanaan detail bangunan sipil seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan, irigasi dan lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan (Marzuki, 2019). Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dampak yang di timbulkan. Sekecil apapun dampak yang ditimbulkan tetap saja bermasalah, sebab dan akibat dari sebuah rekayasa konstruksi, sangat memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, terlepas instansi maupun perorangan dan badan usaha sebagai pemrakarsa (Marzuki, 2019).

Selain itu, terdapat juga masalah dalam distribusi dan penyaluran dana yang tidak merata. Sebagian kecil elit atau

kelompok tertentu cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dari dana tersebut, sementara sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di pinggiran desa atau golongan ekonomi menengah ke bawah, masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ketidakmerataan dalam pemanfaatan dana tersebut juga tercermin dari kurangnya pelatihan dan dukungan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. contohnya seperti dana yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan UMKM, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan sehingga dana tersebut menjadi tidak bermanfaat. Perilaku atau kebiasaan masyarakat tersebut memiliki dampak yang buruk terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif atau pembangunan malah dimanfaatkan secara konsumtif. Hal ini menyebabkan sumber daya tidak dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selama satu tahun terakhir Pemerintah kabupaten Pidie menggelontorkan dana dari APBK tahun 2023, sekitar Rp2 miliar, untuk bantuan modal UMKM (Yonavilbia, 2023). Banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang memiliki potensi dalam bidang pertanian, kerajinan, atau pariwisata, namun tidak mendapatkan akses atau modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Akibatnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi di Kabupaten Pidie. Banyak keluarga yang harus

bertahan dengan pendapatan yang minim dan terbatas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk terlepas.

Daerah Pidie secara efektif mengalokasikan dana pendapatan melalui berbagai mekanisme. Distribusi dan pengelolaan dana desa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan penduduk, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan desa. Selain itu, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Islam Swasta Kabupaten Pidie dirancang dan diawasi dengan cermat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana, berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di daerah. Selanjutnya, manajemen anggaran di pembentukan wilayah pasca-administrasi Kabupaten Pidie menekankan pentingnya penganggaran yang cermat untuk memastikan pengumpulan pendapatan dan realisasi biaya yang efisien, menyoroti pentingnya pemantauan pendapatan dan pengeluaran untuk perencanaan keuangan yang efektif. Selain itu, memanfaatkan model statistik lanjutan seperti model copula yang dapat ditukar multivariat (MEC) membantu dalam memperkirakan pengeluaran rata-rata kecamatan secara akurat, menunjukkan komitmen kabupaten terhadap alokasi dan perencanaan sumber daya yang tepat. Akhirnya, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan tenaga kerja diidentifikasi sebagai faktor kunci yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pidie, menekankan perlunya kebijakan yang mendorong pertumbuhan simultan di daerah-daerah ini untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kawasan.

Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari program-program yang dilakukan pemerintah. Evaluasi terhadap kontribusi Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap penanggulangan kemiskinan memungkinkan perbaikan program-program yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengelola pendapatan daerah secara optimal guna mengurangi tingkat kemiskinan, Kabupaten Pidie masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait peningkatan pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Aceh. Hal ini penting agar dapat membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Proses penurunan angka kemiskinan memerlukan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk penggunaan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana

penggunaan atau realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah dapat memberikan dampak positif terhadap usaha penurunan angka kemiskinan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan ekonomi diantara masyarakat.

Kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi adalah segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan mencari manfaat dan berkah, bertujuan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam lebih mendalam. Kesejahteraan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan non-material. Salah satu aspek non-material yang sangat penting adalah keadilan. Kesejahteraan yang hakiki tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan. Ketika keadilan ditegakkan, kesejahteraan akan secara otomatis tercipta. Sistem ekonomi Islam, yang didasarkan pada tauhid, menekankan pada kedua aspek kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bertujuan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Analisis penggunaan Transfer Ke Daerah dan pendapatan asli Kabupaten Pidie untuk mengurangi tingkat kemiskinan dari perspektif ekonomi Islam melibatkan berbagai faktor. Studi menyoroti pentingnya program seperti Program Harapan Keluarga (PKH) dalam pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada pendidikan dan akses kesehatan. Namun, tantangan seperti keterlambatan pelaksanaan program, kurangnya implikasi optimal,

dan hambatan seperti sumber daya manusia dan infrastruktur yang tidak memadai menghambat efektivitas upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pidie. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial sangat penting dalam memastikan bahwa Transfer Ke Daerah dan pendapatan asli dimanfaatkan secara efisien untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Pidie.

Dalam penelitian ini, tema yang diangkat adalah tingkat kemiskinan, karena merupakan permasalahan yang dialami di setiap daerah. Penelitian semacam ini telah dilakukan sebelumnya di wilayah penelitian yang berbeda. Zulkifli, (2021) melakukan penelitian di Kota Palopo. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan, Transfer Ke Daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Sedangkan Paat *et al.*, (2019) melakukan penelitian yang sama di Kota Bitung. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik, sedangkan Transfer Ke Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Kedua penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, Sehingga hal ini menarik dikaji kembali dengan variabel yang sama namun di wilayah penelitian yang berbeda.

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan Transfer Ke Daerah dan pendapatan asli daerah dapat memengaruhi upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie dengan berlandaskan perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang ada antara penggunaan Transfer Ke Daerah dan pendapatan asli daerah dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pidie terhadap penurunan Angka kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Transfer Ke Daerah dan pendapatan asli daerah terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah penelitian yang diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten pidie dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi islam dalam pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penurunan angka kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat menjadi informasi dan acuan kepada masyarakat dan pemerintah, serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,

dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program yang terarah dan tepat guna.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Dapat dijadikan bahan dasar dalam merancang program-program kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan juga kebijakan pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai analisis penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap penurunan angka kemiskinan berdasarkan perspektif ekonomi islam dari tahun 2014-2023 yang terdapat di Kabupaten Pidie dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. Penelitian ini juga membahas teori-teori dalam perspektif ekonomi Islam mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah, kemiskinan, dan kemaslahatan ekonomi.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan agar penelitian lebih teratur dan terarah. Adapun sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran penelitian secara garis besar untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan susunan sistematika penulisan di penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal skripsi. Secara ringkas menerapkan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori atau fakta yang ada di lapangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang operasional penelitian yang menguraikan variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat penjelasan secara singkat tentang gambaran perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi. Selanjutnya memuat tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengolahan data, yang akan menjawab jawaban dari rumusan masalah di bab I.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sekaligus merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya juga ada saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini agar dapat menentukan kebijakan dalam perekonomian dimasa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Transfer Ke Daerah

Undang-undang No. 1 tahun 2022, Dana perimbangan diganti istilah baru menjadi Transfer Ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Rasu *et al.* (2019) Transfer Ke Daerah adalah penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah atasan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer Ke Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Lathifa, 2023).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa “Dana Perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN”. Pelaksanaan desentralisasi memerlukan biaya yang besar bagi pemerintah daerah. Penerimaan daerah atau PAD saja belum cukup mendanai semua kebutuhan daerah tersebut. Oleh karena itu, diatur dana pusat untuk membantu

daerah yang dinamakan Transfer Ke Daerah. Transfer Ke Daerah adalah bentuk pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk anggaran, melalui alokasi dana. Alokasi dana adalah pelimpahan sejumlah anggaran untuk tujuan tertentu. Pelimpahan dalam Transfer Ke Daerah tersebut ditujukan untuk mencukupi kebutuhan dana aktivitas dan program di daerah (Redaksi OCBC NISP, 2022).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transfer Ke Daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Nurlela, 2019).

2.1.1 Dana Bagi Hasil

Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 angka 70 mengatakan “Dana Bagi Hasil” yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Menurut Arina *et al.* (2019) Dana Bagi Hasil (revenue sharing) atau DBH adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1), menyebutkan sumber penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).

DBH yang bersumber dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25/29 dan 21, sementara DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi (Rasu *et al.*, 2019). Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2022 DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, alokasi DBH per daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan, dimana 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119, dan 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak:

a) Pajak Penghasilan

DBH Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen)
3. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).

b) Pajak Bumi dan Bangunan

DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah dibagikan kepada:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen)
2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen)
3. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen)

c) cukai hasil tembakau

DBH cukai hasil tembakau untuk daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan daerah lainnya yang meliputi:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen)
3. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam:

a) Kehutanan

DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a bersumber dari penerimaan:

1. iuran izin usaha pemanfaatan hutan

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian daerah, dibagikan kepada:

- a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen)
- b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh delapan persen).

2. Provisi sumber daya hutan

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

- a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen)
- b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen)

- c. Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen)
 - d. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen).
3. Dana reboisasi.

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil, dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

b) Mineral dan batu bara

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b bersumber dari penerimaan:

1. iuran tetap

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada:

- a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen)
- b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Iuran produksi.

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada:

- a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen)
 - b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen)
 - c. Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen)
 - d. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen)
 - e. Kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen)
- c) Minyak bumi dan gas bumi

DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DBH sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan

sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen)
2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen)
3. Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen)
4. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen)
5. Kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

1. Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen)
2. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen)
3. Kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

d) Panas bumi

DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 1 1 ayat (3) huruf d, bersumber dari:

1. Iuran tetap
2. Iuran produksi.

DBH sumber daya alam panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen)
 2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen)
 3. Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen)
 4. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen)
 5. Kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).
- e) Perikanan

DBH sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf e ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH sumber daya alam perikanan untuk Daerah dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut undang-undang no. 1 tahun 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan

tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan antar daerah (Sisilia & Harsono, 2021).

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh masing-masing daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
2. Besaran Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.
3. Alokasi dasar yang berupa jumlah PNS yang ada di daerah.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat dalam setahun.
5. Luas dari wilayah daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum ini bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah, besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen). Penyaluran DAU, DAK dan DBH disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke kas umum daerah (Rasu *et al.*, 2019).

Menurut Undang-Undang no. 33 Pasal 27 tahun 2004, terdapat beberapa ketentuan dalam aturan penghitungan Dana alokasi Umum (DAU) diantaranya sebagai berikut:

1. Besaran porsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dengan kabupaten/kota dihitung berdasarkan bandingan kepentingan dan keperluan atas wewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
2. Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) paling sedikit 26% dari total pendapatan bersih sesuai APBN.
3. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi

dan kabupaten/kota ditetapkan dalam imbang 10% dan 90%.

4. Besaran dana alokasi umum yang dimaksud dalam poin 1 di tentukan berdasarkan APBN.

Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 2022, Dana Alokasi Umum untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik. Kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Satuan biaya dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan adalah jumlah target penerima layanan, seperti jumlah penduduk atau jumlah siswa, dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Faktor penyesuaian adalah indikator yang

memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi.

DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 angka 70 mengatakan “Dana Alokasi Khusus” yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Menurut Rasu *et al.* (2019) alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi:

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
- d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
- e. Pembangunan Jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2022, DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. mencapai prioritas nasional
- b. mempercepat pembangunan daerah
- c. mengurangi kesenjangan layanan publik
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.

Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah
- c. Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DAK ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah.

2.2 Pendapatan asli Daerah

2.2.1 Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 angka 20 mengatakan “Pendapatan Asli Daerah” yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Arina *et al.*

(2019) PAD dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, Transfer Ke Daerah keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Wardani & Fadhlia, 2017).

Pendapatan daerah merupakan sejumlah dana yang diterima oleh daerah, baik yang berasal dari hasil usahanya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain yang sah (Nilawati, 2019). PAD juga diartikan seluruh pendapatan yang diterima pemerintah daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di pemerintah daerah (Nusa & Panggalo, 2022). PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (Nurlela, 2019).

Menurut Nusa & Panggalo. (2022) Untuk meningkatkan PAD di provinsi atau di kabupaten/kota, maka pemerintah setempat melakukan perbaikan sistem perpajakan dan retribusi. Kabupaten

Pidie yang merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Aceh adalah salah satu kabupaten yang berpotensi sebagai sumber PAD karena banyaknya potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya yaitu emas yang terdapat di Kecamatan Geumpang. Sedangkan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Pidie adalah akumulasi dari pajak, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang berasal dari Kabupaten Pidie. Potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Pidie bisa dimaksimalkan kembali untuk menunjang peningkatan PAD Kabupaten Pidie terutama mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie melalui pembangunan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat Pidie itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di wilayahnya. PAD menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan di tingkat lokal.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber PAD menurut undang-undang No. 1 tahun 2022, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

2.2.2.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2022, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, pembagian jenis pajak pada pajak daerah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Alat Berat
 - d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - e) Pajak Air Permukaan
 - f) Pajak rokok
 - g) Opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Air Tanah
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Sarang Burung Walet
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak daerah merupakan salah satu pos terpenting dalam penerimaan PAD, yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.2 Retribusi Daerah

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 2022, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009, Objek dan golongan retribusi terdiri dari:

1. Retribusi Jasa umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus
- k) Retribusi pengolahan limbah cair
- l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m) Retribusi pelayanan pendidikan dan
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi Usaha umum

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyebrangan di air
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

2.2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan komponen pendapatan daerah yang pengelolaannya di ambil alih oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kegiatannya, pengelolaan kekayaan daerah dioperasikan oleh badan usaha milik daerah yang sebagian besar bahkan semua modal usahanya berasal dari daerah. Dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh BUMD terdapat dua aspek penting yaitu Kekayaan daerah dikelola secara tersendiri oleh pengurus BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan tersebut.

Menurut Nurlela (2019), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah Jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
3. Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

menyatakan bahwa Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
3. Hasil kerja sama daerah
4. Jasa giro
5. Hasil pengelolaan dana bergulir
6. Pendapatan bunga
7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah
8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.
9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
11. Pendapatan denda pajak daerah
12. Pendapatan denda retribusi daerah
13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
14. Pendapatan dari pengembalian
15. Pendapatan dari BLUD dan
16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan praturan Perundang-undangan

Dalam rangka mendukung atau memperkuat kebijakan pemerintah daerah di daerah tertentu, penerimaan lain-lain yang sah mampu memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, baik dalam kegiatan materi maupun non materi dalam hal kegiatan usaha.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Rasu *et al.* (2019) Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Keadaan ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan rumah. Pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada penurunan kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kemiskinan dapat diakibatkan oleh kekurangan sumber daya seperti uang dan barang untuk digunakan memenuhi kebutuhan dasar hidup (Estrada, 2020). Jika dilihat dari satuan pengukuran, kemiskinan memiliki dua jenis, yaitu kemiskinan relatif dan absolut, Sedangkan jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan juga memiliki dua jenis diantaranya kemiskinan alamiah dan struktural (Gumelar & Khairina, 2021).

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum

dapat menjangkau seluruh masyarakat, sedangkan kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara (Aris, 2023). Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam, sedangkan kemiskinan struktural muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia (Damayanti, 2022).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya pendapatan, kurangnya peluang pekerjaan, ketidaksetaraan ekonomi, konflik sosial, dan faktor-faktor struktural lainnya.

2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Priseptian & Primandhana. (2022) kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti upah minimum, kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran

setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja (Larasati Prayoga *et al.* 2021).

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Aris, (2023) yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Sehingga, dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat.

2. Masyarakat Pengangguran Meningkat

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat.

3. Pendidikan Yang Rendah

Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan

rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah.

4. Terjadi Bencana Alam

Bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

5. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan.

2.3.3 Indikator Kemiskinan

Menurut Aprillyana, (2019) Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Ratio* (HCR-P0), yang disebut sebagai persentase penduduk miskin, merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
2. *Poverty Gap Index* (PG-P1), yang disebut sebagai indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (PS-P2), yang disebut sebagai indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menurut Nugroho *et al.* (2020) Indikator pendahulu angka kemiskinan yaitu:

1. Angka Inflasi

Angka inflasi pada umumnya dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi Statistik (BRS) pada setiap minggu pertama setelah akhir bulan laporan. Sementara itu, angka kemiskinan dan indikatornya dipublikasikan setiap minggu pertama setelah 3 bulan pelaksanaan survei. Oleh karena itu, angka inflasi dalam kajian ini dijadikan sebagai indikator pendahulu (leading indicator) dari angka kemiskinan. Penempatan angka inflasi sebagai indikator pendahulu didasarkan pada pengaruh inflasi terhadap angka kemiskinan dan angka yang dipublikasikan terlebih dahulu dibandingkan angka kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Sama halnya seperti angka inflasi, pertumbuhan ekonomi secara reguler dipublikasikan oleh BPS melalui BRS setiap minggu pertama pada bulan kedua setelah laporan. Sementara itu, angka kemiskinan dan indikatornya dipublikasikan setiap minggu pertama setelah 3 bulan pelaksanaan survei. Oleh karena itu, angka pertumbuhan

ekonomi dalam kajian ini dijadikan sebagai indikator pendahulu (leading indicator) dari angka kemiskinan. Penempatan angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pendahulu didasarkan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan dan angka yang dipublikasikan terlebih dahulu dibandingkan angka kemiskinan.

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode yang paling sering digunakan oleh BPS adalah metode geometris, meskipun demikian laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan aritmatik maupun eksponensial. Dalam setiap survei yang dilakukan oleh BPS, pertumbuhan penduduk merupakan faktor pengubah dari pembobot individu, hal ini juga berimplikasi pada penghitungan angka kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan

secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (BPS, 2024).

Dari beberapa indikator kemiskinan di atas, peneliti menggunakan indikator kemiskinan yang diidentifikasi oleh BPS, yang mencakup Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan.

2.3.4 Dampak Kemiskinan

Menurut Nadia, (2023) beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan, di antaranya:

1. Meningkatnya angka pengangguran
2. Banyaknya kasus putus sekolah
3. Muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat
4. Meningkatnya tindakan kriminalitas
5. Angka Kematian Meningkat
6. Konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan

2.3.5 Langkah-Langkah Pengentasan Kemiskinan

Faulana dan Murniawaty (2021) Penanggulangan atau pengentasan kemiskinan telah dibagi dalam tiga kelompok diantaranya yaitu:

1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga miskin

dengan meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Program ini melibatkan beberapa inisiatif, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

2. Program menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan, dengan maksud untuk memutus rantai kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
3. Program menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan dengan berfokus pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk berusaha dan meningkatkan kualitas hidup. Program ini melibatkan penyediaan modal atau pinjaman dalam skala mikro untuk mendukung usaha mereka.

2.3.6 Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Makna kemiskinan dalam Islam merupakan suatu keadaan manusia yang sangat butuh akan karunia dari Allah SWT (Ilmi,

2017). Secara bahasa, kemiskinan merujuk pada kondisi ketiadaan harta benda, kekurangan, atau pendapatan yang sangat rendah, sedangkan secara umum, kemiskinan mencakup suatu kondisi di mana kehidupan tidak memungkinkan pemeliharaan efisiensi fisik, yang merujuk pada keadaan ekonomi yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk membeli barang dan jasa yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan pribadi (Hamdani, 2015). Secara etimologi kata “miskin” berasal dari Bahasa Arab “sakana” (سكن) yang berarti diam, tenang, “sakuna” (سكن) berarti menjadi miskin. Miskin juga berasal dari kata “askana”, “tasakkana”, “tamaskana” yang artinya juga menjadi miskin (Habibah, 2023).

Wahbah Zuhaili di dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengartikan miskin sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam mencukupi seluruh kebutuhannya, di dalam al-Tafsir al-Munir-nya Wahbah juga memberi pengertian yang serupa, dengan keterangan tambahan bahwasanya seseorang disebut miskin dikarenakan dia terhinakan dan menjadi miskin sebab kebutuhannya tersebut (Mustofa & Utomo, 2023).

2.4 Ekonomi Islam

2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Islam bukan hanya sekadar keyakinan terhadap aspek-aspek tertentu dalam hidup, tetapi merupakan konsep yang menyatukan dan menghubungkan seluruh aspek kehidupan, yang dapat disebut sebagai sistem kepercayaan. Islam mengajarkan bahwa semua

aspek kehidupan dan alam merupakan kehendak dan milik Allah, dan tidak ada pemisahan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Ekonomi Islam dibangun berlandaskan agama Islam, karena aktivitas ekonomi sesuatu bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam (Anggraini *et al.*, 2018). Di samping itu, Ekonomi Islam juga memandu perilaku individu sesuai dengan ajaran Allah SWT, mulai dari fase awal kehidupan, cara melihat dan menganalisis setiap masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip atau nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian Dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqh (Prasetyo, 2018).

2.4.2 Prinsip-prinsip dalam ekonomi islam

Menurut Anggraini *et al.*, (2018) Prinsip- prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi yang didasarkan dengan lima nilai universal diantaranya:

- 1. Prinsip Tauhid (Keimanan)**

Tauhid adalah pondasi ajaran Islam. Dengan mengakui tauhid, manusia menyadari bahwa "Tiada sesuatu pun yang pantas diibadahi kecuali Allah" karena seluruh alam semesta, termasuk manusia dan segala sumber daya yang ada di dalamnya, adalah

ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah adalah Pemilik sejati. Manusia berperan sebagai khalifah yang diberikan amanah untuk sementara waktu, menggunakan dengan bijaksana, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

2. Prinsip Adl (Keadilan)

Keadilan mengandung arti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, menempatkan hal-hal secara proporsional, serta memberikan perlakuan yang setara dan seimbang. Sikap adil dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni adil yang berhubungan dengan individu dan adil yang terkait dengan aspek sosial dan pemerintahan.

3. Prinsip Nubuwwah (Kenabian)

Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk-Nya kepada umat manusia tentang cara hidup yang baik dan benar di dunia, serta mengajarkan jalan untuk kembali kepada sumber segala sesuatu, yaitu kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Fungsi Rasul adalah menjadi teladan terbaik yang harus diikuti oleh manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Allah telah mengirimkan teladan terakhir dan yang paling sempurna untuk diikuti hingga akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Saw. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. yang seharusnya dijadikan teladan oleh manusia umumnya, dan oleh pelaku ekonomi serta bisnis khususnya, adalah kejujuran (Sidiq), tanggung jawab (amanah), kebijaksanaan (fathonah), dan keterbukaan dalam berkomunikasi dan pemasaran (tabligh).

4. Prinsip Khilafah (Pemerintahan)

Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka ditugaskan sebagai pemimpin dan pemakmur untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, pada hakikatnya, setiap manusia memiliki peran sebagai pemimpin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi, "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Prinsip ini berlaku untuk semua individu, baik sebagai pribadi, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, dan dalam berbagai peran lainnya.

5. Prinsip Ma'ad (Hasil)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai kebangkitan, namun secara harfiah, ma'ad berarti kembali. Ini mengindikasikan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Kehidupan manusia tidak hanya terbatas di dunia ini, melainkan harus melanjutkan ke alam akhirat. Manusia perlu memegang prinsip keyakinan bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Sang Pencipta. Pandangan muslim terhadap dunia dan akhirat dapat diungkapkan sebagai: "Dunia adalah ladang bagi Akhirat." Ini berarti dunia adalah tempat atau wadah bagi manusia untuk bekerja, beraktivitas, menjalankan ibadah, serta melakukan amal sholeh sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat.

2.4.3 Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat dapat tercapai apabila semua kebutuhan hidup manusia terpenuhi dengan seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrowi. Ketika kebutuhan manusia tercukupi, hal tersebut akan memberikan dampak yang bermanfaat atau disebut masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik materiil maupun non-materiil, yang telah terpenuhi dan mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Anggraini *et al.*, 2018). Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat (Kurniawan & Hudafi, 2021).

1. Dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total (Effendi, 2014). Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu (Kurniawan & Hudafi, 2021):

- a. Penjagaan agama (*hifz al-din*)
- b. Penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Penjagaan akal (*hifz al-'aql*)
- d. Penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*)

e. Penjagaan harta benda (*hifz al-māl*)

2. Hajiyat

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan, hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi (Kurniawan & Hudafi, 2021). Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

3. Tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Kurniawan & Hudafi, 2021). Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

2.5 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta unsur-unsur lain yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah, (2021) dengan judul “Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan

Dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten /Kota Di Aceh)”. Hasil analisis kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD), Tingkat Kemiskinan (KMS), dan Kemaslahatan Ekonomi (IPM) berdasarkan data panel Kabupaten/Kota di Aceh, seperti yang dijelaskan dalam studi oleh Ulfah tahun 2021. Hasil Granger causality test menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara Belanja Daerah (BD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta antara Tingkat Kemiskinan (KMS) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, BD dan KMS memiliki pengaruh terhadap PAD, dan sebaliknya, PAD juga memiliki pengaruh terhadap BD dan KMS. Selanjutnya, pada variabel Tingkat Kemiskinan (KMS) dan Kemaslahatan Ekonomi (IPM), terdapat hubungan satu arah terhadap Belanja Daerah (BD). Ini mengindikasikan bahwa KMS dan IPM tidak memiliki pengaruh terhadap BD, namun sebaliknya, BD memiliki pengaruh terhadap KMS dan IPM. Sementara itu, tidak terdapat hubungan antara variabel Tingkat Kemiskinan (KMS) dan Kemaslahatan Ekonomi (IPM), yang berarti KMS tidak berpengaruh terhadap IPM, dan sebaliknya, IPM juga tidak berpengaruh terhadap KMS.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pane *et al.*, (2021) dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan

Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”. Analisis ini mengeksplorasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan oleh Pane dkk. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, sesuai dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya. Implikasi dari penelitian ini sangat relevan dalam konteks kebijakan, karena memungkinkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendukung belanja daerah, serta memengaruhi kemandirian daerah. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti perlunya penyelidikan lebih lanjut terkait DAU yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal, menandakan adanya potensi untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi alokasi dana tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Simamora & Budiwitjaksono, (2022) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. Judul tersebut

menggambarkan hasil analisis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2018-2020, menurut penelitian yang dilakukan oleh Simamora & Budiwitjaksono tahun 2022. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Namun, Dana Alokasi Umum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Belanja Modal terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, semua variabel independen yang meliputi PAD, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah, (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Kalimat tersebut menggambarkan hasil analisis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan

Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2018-2020, menurut penelitian yang dilakukan oleh Simamora & Budiwitjaksono tahun 2022. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Namun, Dana Alokasi Umum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Belanja Modal terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, semua variabel independen yang meliputi PAD, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rasu *et al.*, (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado”. Kalimat tersebut menguraikan hasil analisis mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado, seperti yang dijabarkan oleh Rasu *et al.* [ada tahun 2019. Berdasarkan penelitian

ini, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat, tingkat kemiskinan cenderung menurun, dan sebaliknya. Sementara itu, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Ini berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, dan sebaliknya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya, kenaikan Dana Bagi Hasil dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan, sedangkan penurunan Dana Bagi Hasil dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

6. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Penerimaan Zakat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang disajikan oleh Firdaus pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dianggap signifikan pada Model 1, Model 2, dan Model 3 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Zakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif terhadap

tingkat kemiskinan, artinya jika PAD meningkat, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Selain itu, Dana Perimbangan juga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Perimbangan dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Yang menarik, variabel Zakat juga terbukti signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Zakat dapat berdampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Kesimpulannya, ketiga variabel tersebut, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Zakat, dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait upaya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

7. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2002 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2), dan Rata-Rata Lama Sekolah (X_3) secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi

Jawa Timur. Pertama, Tingkat Pengangguran terbukti memberikan kontribusi terhadap kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan tingkat pengangguran berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kedua, Pendapatan Asli Daerah juga terbukti memberikan kontribusi terhadap kemiskinan. Hal ini berarti setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, Rata-Rata Lama Sekolah juga memberikan kontribusi langsung terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, setiap kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, kesimpulan dari studi ini adalah bahwa Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, dan Rata-Rata Lama Sekolah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2002 hingga 2021.

8. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak signifikan secara statistik. Artinya, meskipun meningkatnya Pendapatan Asli Daerah cenderung berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Kota Bitung, namun dampaknya tidak secara signifikan. Sementara itu, Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Perimbangan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung. Namun demikian, hasil estimasi kedua menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menekan tingkat kemiskinan di Kota Bitung. Sedangkan, Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung, meskipun tidak signifikan secara statistik. Meskipun ada kenaikan kemiskinan akibat peningkatan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, namun dampaknya tidak signifikan. Kesimpulannya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung dapat membantu dalam menekan tingkat kemiskinan, namun

peningkatan Dana Perimbangan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau penurunan tingkat kemiskinan. Seperti pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan Dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten /Kota Di Aceh) (Ulfah, 2021)	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil <i>granger causality test</i> , terdapat hubungan kausalitas dua arah dari BD ke PAD dan IPM ke PAD. Artinya BD dan IPM berpengaruh terhadap PAD, dan sebaliknya PAD berpengaruh terhadap BD dan IPM. Pada variabel IPM dan KMS terdapat hubungan satu arah terhadap BD. Artinya IPM dan KMS tidak berpengaruh terhadap BD, sebaliknya BD berpengaruh terhadap IPM dan juga KMS. Sedangkan variabel KMS dan IPM tidak terdapat hubungan diantara keduanya, yang mana artinya variabel KMS tidak berpengaruh terhadap IPM, begitu pula sebaliknya IPM tidak berpengaruh terhadap KMS
2.	Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (Pane <i>et al.</i> , 2021)	Metode Kuantitatif	Temuan riset ini memberikan wawasan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal yang mendukung beberapa riset sebelumnya. Penelitian berimplikasi pada kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerah yang akan membiayai belanja daerah dan juga berdampak pada kemandirian daerah. Namun perlu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			dilakukan penyelidikan lebih mendalam terkait DAU yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
3.	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020 (Simamora & Budiwitjaksono, 2022)	Metode Kuantitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda, dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keseluruhan variabel independen dengan bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.
4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Azizah, 2022)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Ditunjukkan dengan koefisien sebesar 0,605 artinya jika setiap kenaikan 1% Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,605 atau 60,5%. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Ditunjukkan dengan koefisien 13,507 artinya jika setiap kenaikan 1% Dana Alokasi Umum maka Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 13,507 atau 1.350,7%.
5.	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Yang

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Rasu <i>et al.</i> , 2019)		artinya, apabila pendapatan asli daerah meningkat kemiskinan akan turun dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana alokasi umum meningkat kemiskinan akan meningkat dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana alokasi khusus meningkat akan mendorong kenaikan kemiskinan dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana bagi hasil meningkat kemiskinan akan meningkat dan sebaliknya.
6.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh (Firdaus, 2019)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini berdasarkan uraian data maka variabel-variabel yang dianggap signifikan pada Model 1, Model 2, dan Model 3 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan zakat. Pada variabel PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pada variabel Dana Perimbangan mendapati hasil negatif terhadap kemiskinan. Terakhir, pada variabel zakat menunjukkan jika zakat meningkat maka dapat menurunkan kemiskinan. Dimana ketiga variabel tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam hal tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2002-2021 (Rukmana & Imaningsih2, 2023)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian dalam pengujian analisis regresi linier berganda, didapati Pengaruh Tingkat Pengangguran (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Rata-Rata Lama Sekolah (X3) terhadap Kemiskinan (Y), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Pengangguran memberikan kontribusi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jadi, setiap kenaikan Pengangguran terhadap Kemiskinan memberikan dampak terhadap penurunan angka Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jadi, setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan memberikan dampak terhadap penurunan angka Kemiskinan dan Rata-Rata Lama Sekolah memberikan kontribusi langsung terhadap Kemiskinan. Jadi, setiap kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan memberikan dampak terhadap penurunan angka Kemiskinan.
8.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung (Paat <i>et al.</i> , 2019)	Metoda I R Kuantitatif	Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana

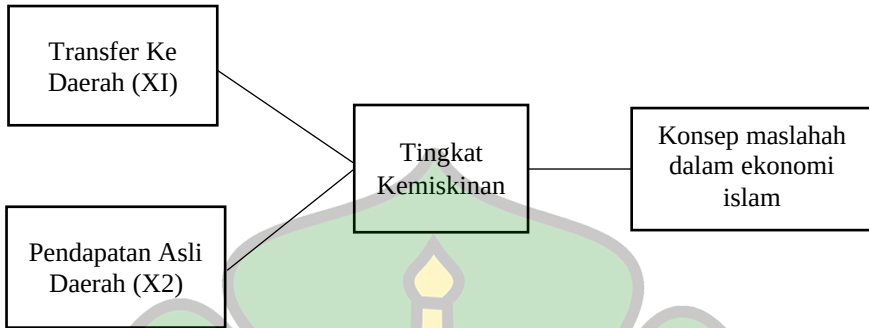
No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Perimbangan belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung. Sedangkan hasil estimasi kedua yaitu didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menekan tingkat kemiskinan di Kota Bitung. Transfer Ke Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Walaupun ada kenaikan kemiskinan akibat dari adanya keinakan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat akan tetapi tidak berpengaruh signifikan.

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti pada gambar 2.1:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah dugaan sementara atau referensi yang dirumuskan serta diterima yang dapat menjelaskan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Melalui kerangka penelitian tersebut, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut ini:

- H_{01} : Tidak terdapat pengaruh penggunaan Transfer Ke Daerah terhadap penurunan angka kemiskinan.
- H_{a1} : Terdapat pengaruh penggunaan Transfer Ke Daerah terhadap penurunan angka kemiskinan.
- H_{02} : Tidak terdapat pengaruh PAD terhadap penurunan angka kemiskinan.
- H_{a2} : Terdapat pengaruh PAD terhadap penurunan angka kemiskinan.
- H_{03} : Tidak terdapat pengaruh penggunaan Transfer Ke Daerah dan PAD Secara simultan terhadap penurunan angka kemiskinan.

H_{a3}: Terdapat pengaruh penggunaan Transfer Ke Daerah dan PAD Secara simultan terhadap penurunan angka kemiskinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengikuti prinsip-prinsip positivisme, digunakan untuk menyelidiki sekelompok orang atau objek tertentu, mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat-alat penelitian, menganalisis data secara statistik, dengan maksud untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.2 Jenis Data

Data penelitian adalah semua informasi dan angka yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu informasi. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi-instansi tertentu dalam bentuk laporan, kemudian data sekunder tersebut digunakan dalam bentuk data *time series*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Library Research*, yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan variabel

penelitian, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan masalah dan mengambil data dari Badan Pusat Statistik yang berupa data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah, dan kemiskinan.

3.4 Operasional Variabel

Operasional variabel merujuk pada variabel-variabel yang akan dijelaskan dan menjadi fokus utama penelitian. variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Bebas / Independen (Y)

Kemiskinan (Y), adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Variabel yang digunakan adalah data persentase kemiskinan tahun 2014-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Variabel Terikat / Dependen (X)

- a) Transfer Ke Daerah (X1), dalam penelitian ini digambarkan jumlah pemasukan daerah yang merupakan pembiayaan dari pemerintah pusat. Transfer Ke Daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel Transfer Ke Daerah dalam penelitian ini dinyatakan dalam rupiah yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014-2023.
- b) Pendapatan Asli Daerah (X2), adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. PAD dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah pemasukan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dinyatakan dalam rupiah tahun 2014-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk informasi lebih detail mengenai variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kemiskinan (Y)	Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah (Rasu <i>et al.</i> , 2019).	1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) 2. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) (http://www.bps.go.id).
Transfer Ke Daerah (X1)	Transfer Ke Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Lathifa, 2023).	1. Dana Bagi Hasil (DBH) 2. Dana Alokasi Umum (DAU) 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU No 33 Tahun 2004).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)	Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Wardani & Fadhlia, 2017).	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Pengelolaan kekayaan daerah 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (UU No. 1 tahun 2022).

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah pendekatan analisis data kuantitatif. Pendekatan analisis data kuantitatif adalah metode yang memanfaatkan perhitungan angka-angka untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan

masalah. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variable tidak bebas (dependent variable), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variable tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variable bebas (independent variable). Model analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2,)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kemiskinan

X₁ = Transfer Ke Daerah

X₂ = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta/ Intercept

β = Koefisien Regresi

e = Standar Error

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat statistik yang harus dipenuhi saat melakukan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pengujian asumsi klasik yang dilakukan, termasuk:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) dalam model regresi memiliki distribusi yang mengikuti kurva normal (Ghozali, 2016). Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji *normality test*, dan hasil perhitungannya dievaluasi berdasarkan nilai signifikansi statistik. Jika nilai signifikansi > 0.05 , maka data dianggap mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0.05, data dianggap tidak mengikuti distribusi normal.

Menurut Ghozali (2016), jika hasil uji menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi data menggunakan Log Natural (LN) dan mengevaluasinya dengan menggunakan P-P Plot. Keputusan diambil berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Jika data tersebar mendekati garis normal dan mengikuti pola diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data tersebar secara signifikan jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti pola

diagonal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat korelasi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Idealnya, dalam model regresi yang baik, tidak seharusnya terdapat korelasi yang kuat antara variabel-variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, kita dapat mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance.

Sesuai dengan panduan Ghazali (2016), langkah-langkah analisis asumsi multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $VIF < 10$ dan nilai Tolerance $> 0,10$, maka tidak ada masalah multikolinieritas.
- 2) Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai Tolerance $< 0,10$, maka terdapat masalah multikolinieritas dalam model.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016), tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, yakni variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap untuk mendiktesikannya atau dengan cara melihat grafik perhitungan antara nilai prediksi variabel tingkat (zpred) dengan

residual (Sresid). Dasar analisis uji Heteroskedastisitas sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM).

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung untuk setiap koefisien regresi dengan nilai t tabel (nilai kritis) pada tingkat signifikansi 5%, dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$, di mana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel.

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial

Transfer Ke Daerah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

- b. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara parsial

Transfer Ke Daerah dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

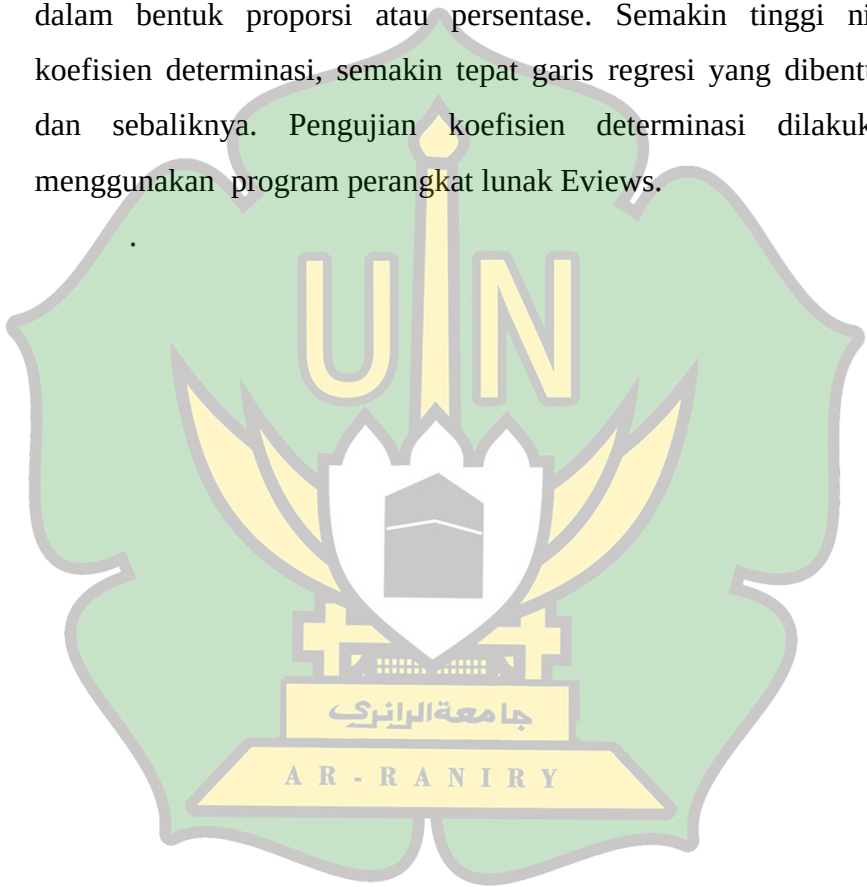
3.6.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji Simultan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel yang terdapat dalam tabel Analysis Of Variance. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) $df = (n-k)$ dan $(k-1)$, di mana n adalah jumlah observasi, dan k adalah jumlah variabel independen. Kriteria uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa Transfer Ke Daerah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
- b. Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa Transfer Ke Daerah dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan dengan Adjusted R^2 (adjusted R square) untuk mengukur sejauh mana variabel dependen memberikan kontribusi terhadap variabel independen dalam bentuk proporsi atau persentase. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin tepat garis regresi yang dibentuk, dan sebaliknya. Pengujian koefisien determinasi dilakukan menggunakan program perangkat lunak Eviews.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

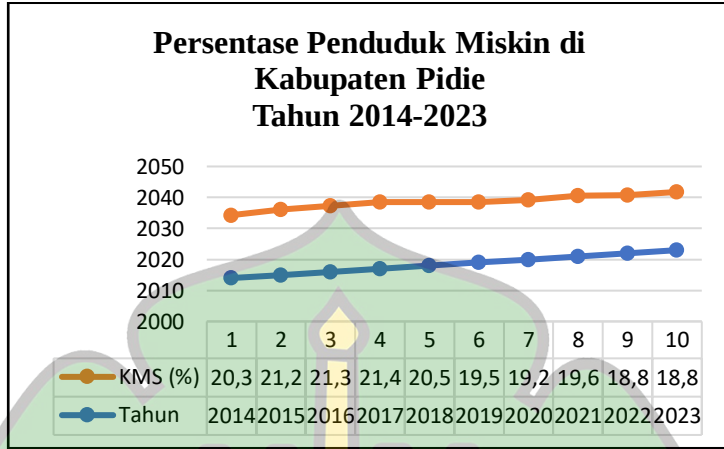
4.1 Statistika Deskriptif

4.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang dianggap wajar dalam masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan juga dianggap sebagai masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Provinsi Aceh, yang terdiri dari 23 kabupaten/kota, terletak di ujung paling barat Indonesia dan merupakan bagian dari otonomi daerah. Namun, provinsi ini juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Salah satunya yaitu Kabupaten Pidie, dengan tingkat kemiskinan tinggi yang tersebar di seluruh kecamatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie dapat dilihat pada gambar 4.1:

Gambar 4.1



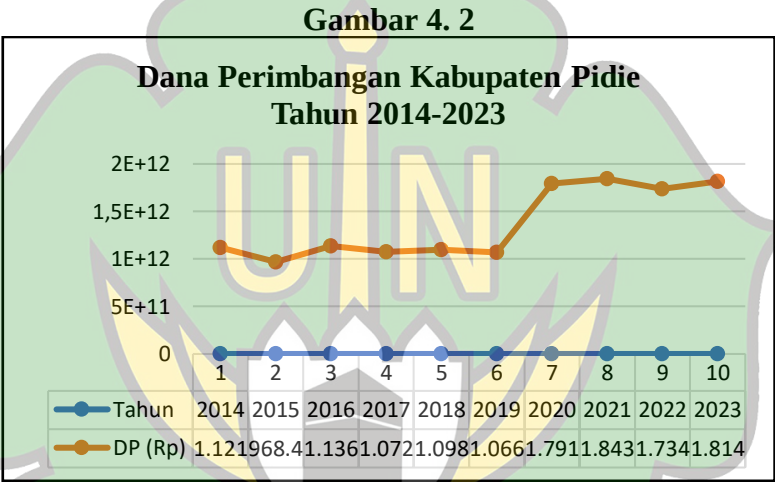
Sumber: Data diolah peneliti (2024)

4.1.2 Transfer Ke Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transfer Ke Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, selain PAD yang berasal dari sumber-sumber di daerah itu sendiri, keuangan daerah juga diperoleh dari dana transfer pemerintah pusat. Dana ini bertujuan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah, sehingga dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Transfer Ke Daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Putri & Ratnawati, 2023).

Transfer Ke Daerah juga merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Dimana, rata-rata Transfer Ke Daerah yang diterima oleh Kabupaten Pidie dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada gambar 4.2:



Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Tabel 4.2 Menunjukkan rata-rata penerimaan Transfer Ke Daerah di Kabupaten Pidie dari Tahun 2014 sampai dengan 2023. Berdasarkan tabel tersebut terlihat jika Transfer Ke Daerah di Kabupaten Pidie tidak selalu meningkat setiap tahunnya. Tetapi jika di bandingkan selama sepuluh tahun terakhir Transfer Ke Daerah tersebut mengalami peningkatan yang tinggi. Hal ini didominasi oleh dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Pidie, yang digunakan untuk pembangunan daerah, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

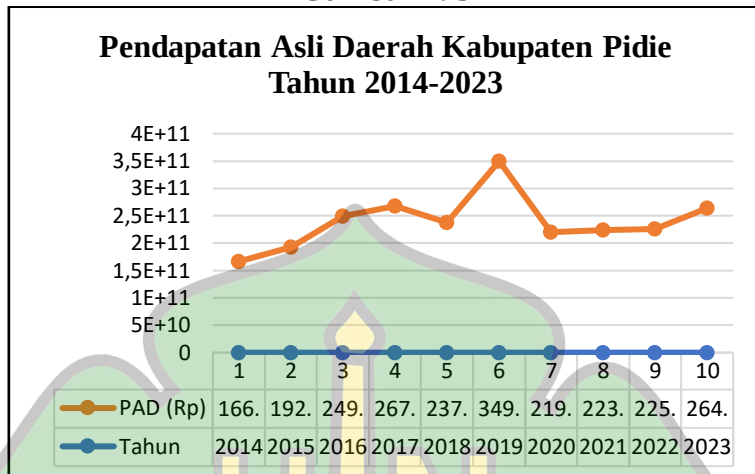
bahwa Kabupaten Pidie masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

4.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan yang diterapkan melalui otonomi daerah harus didukung oleh pendanaan yang memadai agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lancar. Dalam sistem otonomi daerah, keuangan daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri serta dari pemerintah pusat, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan tersebut diantaranya ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Pasal 1 dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah seperti dana hibah (Lasnawati *et al.*, 2023).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Pada gambar 4.3 dapat dilihat rata-rata dana PAD di Kabupaten Pidie tahun 2024 sampai dengan 2023.

Gambar 4. 3



Sumber: Data diolah peneliti (2024)

4.2 Pengujian dan Hasil Penelitian

Secara kuantitatif hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat dimodelkan dalam suatu persamaan matematik, sehingga dapat diduga nilai suatu variabel terikat bila diketahui nilai variabel bebasnya. Persamaan matematik yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan terikat sering disebut persamaan regresi (Retnawati, 2017). Persamaan regresi dapat terdiri dari satu atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Persamaan yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat disebut persamaan regresi sederhana, sedangkan yang terdiri dari satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas disebut persamaan regresi berganda. Regresi dapat dipisahkan menjadi regresi linear dan regresi non linear.

Dengan menggunakan metode analisis regresi, maka uji yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Multikolineritas (VIF Test)

Untuk menguji multikolineritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolineritas. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1

Nilai VIF

Variabel	Nilai VIF
Transfer Ke Daerah	1,0098
Pendapatan Asli Daerah	1,0098

Sumber: EvIEWS diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.1 dengan menggunakan uji *Variance Inflation factors* dapat dilihat bahwa nilai *Centered VIF* Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah < 10.00 maka dapat

dinyatakan bahwa asumsi uji Multikolineritas sudah terpenuhi atau tidak terdapat masalah multikolineritas dalam model prediksi.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah distribusi variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi memiliki pola distribusi yang bersifat normal. Dalam uji normalitas peneliti menggunakan metode *uji normality test*, dengan cara melihat nilai *Probability Jarque Bera*, jika nilai signifikansi > 0.05 , maka data dianggap mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0.05, data dianggap tidak mengikuti distribusi normal. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Normality Test

Jarque-Bera	0,733532
Probability	0,692972

Sumber: Eviews diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.2 dengan menggunakan uji *Normality Test* dapat dilihat bahwa nilai *Probability Jarque Bera* sebesar $0.692 > 0.05$ maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (lolos Normalitas).

3. Uji Heteroskedastisitas (White Test)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan dalam variansi residual antar observasi dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji

white, yang akan memperoleh nilai *probabilitas Obs*R-square* yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α). Jika nilai probabilitas signifikansinya $>0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya $<0,05$ maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Hasil Uji White Test

Obs*R-squared	Probability
4,3804	0,4960

Sumber: Eviews diolah (2024)

Hasil output menunjukkan nilai *Obs*R-squared* adalah sebesar 4,3804 sedangkan nilai *probabilitas (chi-square)* adalah 0,4960 (lebih besar daripada $\alpha = 0,05$), dengan demikian dapat menerima hipotesis nol bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas atau uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

4. Uji Autokorelasi (LM Test)

Uji yang dilakukan yaitu untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM), yang akan memperoleh nilai *probabilitas Obs*R-square* yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α). Jika nilai probabilitas signifikansinya $>0,05$ maka dapat disimpulkan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi . Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya $<0,05$

maka dapat dikatakan asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4:

Tabel 4.4
Hasil Uji Lagrange Multiplayer

Obs*R-squared	Prob Chi Square(2)
5,9175	0,0519

Sumber: Eviews diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.4 dengan menggunakan uji *lagrange Multiplayer* dapat dilihat bahwa nilai *Prob Chi Square(2)* yang merupakan nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*, yaitu sebesar 0,0519 dimana $>0,05$ sehingga tidak ada masalah autokorelasi serial atau uji auto korelasi sudah terpenuhi.

4.2.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian hipotesis parsial, hipotesis berganda dan koefisien determinasi, berdasarkan estimasi regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen, yaitu Transfer Ke Daerah dan PAD, dengan variabel dependen, yaitu kemiskinan. Model regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini, dan persamaan regresi dapat ditemukan dalam tabel hasil uji *Least Squares*. Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *eviews* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kemiskinan (Y1) (variabel dependen) Transfer Ke Daerah (X1), dan Pendapatan Asli Daerah (X2) (variabel independen) di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5
Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: KMS				
Method: Least Squares				
Sample: 2014 2023				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2430.850	136.7206	17.77969	0.0000
TKD	-2.22E-10	5.69E-11	-3.909934	0.0058
PAD	-5.12E-10	4.31E-10	-1.186609	0.2741
R-squared	0.694782	Mean dependent var		2004.700
Adjusted R-squared	0.607577	S.D. dependent var		101.5864
S.E. of regression	63.63741	Akaike info criterion		11.38761
Sum squared resid	28348.04	Schwarz criterion		11.47838
Log likelihood	-53.93803	Hannan-Quinn criter.		11.28802
F-statistic	7.967225	Durbin-Watson stat		1.537403
Prob(F-statistic)	0.015708			

Sumber: Eviews diolah (2024)

Hasil estimasi TKD pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel TKD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,0058 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$, atau $0,0058 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Variabel TKD mempunyai thitung yakni 3,9099 dengan ttabel = 2,364 jadi thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel TKD memiliki kontribusi terhadap variabel kemiskinan (Y). Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel TKD mempunyai hubungan yang tidak searah dengan kemiskinan (Y). Jadi disimpulkan bahwa

Transfer Ke Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi PAD pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,2741 lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$, atau $0,2741 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel PAD mempunyai thitung yakni 1,1866 dengan $t_{tabel} = 2,364$ jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel PAD tidak memiliki kontribusi terhadap variabel kemiskinan (Y). Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel PAD mempunyai hubungan yang tidak searah dengan kemiskinan (Y). Jadi disimpulkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.

1. Uji T (Uji Parsial)

Analisis uji parsial dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen (bebas) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Uji parsial ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh variabel Transfer Ke Daerah dan PAD terhadap kemiskinan, maka uji t yang digunakan dimana derajat kebebasannya (df) = $n - k = 10 - 3 = 7$, pada $df = 7$ diperoleh $t_{tabel} = 2,364$.

Adapun hasil pengujian uji t hitung dengan menggunakan Eviews pada tabel 4.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel Transfer Ke Daerah (TKD) menunjukkan nilai *t-Statistic* sebesar -3,9099 (bernilai negatif) hal ini berarti t

hitung $> t$ tabel ($3,9099 > 2,364$) dengan nilai *Probabilitas (signifikansi)* sebesar 0,0058. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0,05$, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada $\alpha = 5\%$. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel Transfer Ke Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.

- b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai *t-Statistik* sebesar -1,1866 (bernilai negatif) hal ini berarti t hitung $< t$ tabel ($1,1866 < 2,364$) dengan nilai *probabilitas (signifikansi)* sebesar 0.2741. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan pada $\alpha = 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan dalam model regresi.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F, juga dikenal sebagai uji simultan, dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau membandingkan nilai signifikansi F hitung dengan nilai α (0,05).

Adapun F tabel dengan taraf signifikan 5% (0.05) dengan numerator ($df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$) dan denominatornya ($df_2 = n - k = 10 - 3 = 7$) diperoleh F tabel sebesar 4,7374. Hasil dari uji simultan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

Nilai F hitung = 7,9672 dengan signifikansinya 0,0157, hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu $7,9672 > 4,7374$. Sedangkan jika menggunakan batas signifikansi (0,05), maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0157 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Transfer Ke Daerah (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada $\alpha = 5\%$.

3. Uji Determinan (R^2)

koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Adapun hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai Adj R^2 sebesar 0,6075. Hal ini menunjukkan bahwa Transfer Ke Daerah (DP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi kemiskinan sebesar 60,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Transfer Ke Daerah dan PAD terhadap penurunan angka

kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Berikut ini adalah analisis yang mendalam terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini.

4.3.1 Pengaruh Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pidie

TKD berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 menunjukkan nilai *prob* sebesar $0,0058 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa TKD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pidie. Dengan demikian TKD yang diterima oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pidie memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Semakin besar TKD yang diterima oleh pemerintah daerah maka angka kemiskinan semakin menurun. Sebaliknya jika TKD yang diterima pemerintah menurun maka angka kemiskinan di daerah tersebut akan meningkat.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 TKD mengalami penurunan yang pada tahun sebelumnya sebesar 1.121.517.646.919 menjadi 968.416.475.000. Hal tersebut mempengaruhi persentase kemiskinan yang semakin tinggi, dari yang sebelumnya sebesar 20,29% mengalami peningkatan menjadi 21,18%. Namun pada tiga tahun terakhir TKD tidak memengaruhi tingkat kemiskinan, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa variabel lain di luar penelitian ini. Pada tahun 2021 TKD yang diterima pemerintah lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu dari 1.791.132.340.970 menjadi

1.843.860.436.840. Akan tetapi pada tahun 2021 persentase kemiskinan di Kabupaten pidie juga meningkat, dimana pada tahun sebelumnya persentase kemiskinan sebesar 19,23% menjadi 19,59%. Hal ini mungkin di pengaruhi oleh beberapa variabel lain di luar penelian ini seperti pengangguran dan inflasi yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya.

TKD merupakan dana APBN yang di disribusikan untuk membantu pemeratakan keuangan seluruh daerah dan mendanai kebutuhan belanja dengan tujuan demi tercapainya pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar TKD yang diterima dari pemerintah pusat menandakan bahwa semakin tinggi pula pemerintah daerah tersebut bergantung pada pemerintah pusat yang berdampak pada menurunnya kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain tingginya penerimaan TKD oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi tolak ukur suatu daerah dapat tumbuh atau berkembang.

PAD berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 menunjukkan nilai *prob* sebesar $0,2741 > 0,05$. Hasil tersebut menandakan bahwa PAD berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pidie. Ini berarti bahwa meskipun ada pengaruh PAD terhadap kemiskinan di Kabupaten Pidie, pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap penting secara statistik. Dalam konteks statistik, pengaruh ini mungkin terjadi secara kebetulan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk kesimpulan yang kuat.

Pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menjadi alat ukur dalam melihat kemiskinan di suatu daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah yang besar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut. Sebaliknya, apabila penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah berdampak pada meningkatnya persentase kemiskinan di daerah tersebut. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah pendapatan asli daerah yang diterima, akan tetapi juga diukur dari perannya dalam mengatur pendapatan asli daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah dan kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif.

Untuk meningkatkan pendapatan di Kabupaten Pidie, beberapa strategi dapat diterapkan berdasarkan temuan penelitian. Pertama, Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Pidie telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dengan melibatkan tokoh masyarakat dan melakukan kegiatan sosialisasi yang ekstensif. Kedua, untuk industri kecil seperti Aceh Rimbun Corp, fokus pada kegiatan utama seperti menjaga hubungan pelanggan dan mengadopsi teknologi baru dapat mengarah pada penjualan global dan profitabilitas. Selain itu, pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang berfokus pada kewirausahaan, pemasaran, dan pelatihan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di

wilayah tersebut, yang mengarah pada pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya, mendelegasikan wewenang untuk menetapkan biaya pengguna dan memasukkan keringanan berbasis kebutuhan dapat memastikan penghasil pendapatan yang adil tanpa menolak individu yang tidak dapat membayar. Terakhir, Rencana Pembangunan Ekonomi menekankan investasi publik strategis dan program pembangunan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan kekayaan rumah tangga, investasi bisnis, dan peluang pertumbuhan pekerjaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan di Kabupaten Pidie.

Kabupaten Pidie dapat mengeksplorasi aliran pendapatan inovatif dengan berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan inisiatif tenaga kerja. Selain itu, kabupaten dapat mempertimbangkan memanfaatkan sumber daya mineralnya yang kaya, termasuk emas, tembaga, pasir besi, dan logam lainnya, dengan mengatur dan memformalkan kegiatan pertambangan untuk menghasilkan pendapatan dan mempromosikan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Selain itu, memanfaatkan digitalisasi dan strategi pemasaran digital dapat menarik audiens yang lebih luas untuk seniman lokal, berpotensi meningkatkan aliran pendapatan dan mempromosikan pertukaran budaya dalam pasar seni digital global. Dengan mendiversifikasi sumber pendapatan melalui jalan ini, Kabupaten Pidie dapat merangsang pembangunan ekonomi,

menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan keberlanjutan keuangan secara keseluruhan.

Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan PAD di Kabupaten Pidie mencakup berbagai sektor untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bidang umum yang menjadi prioritas dalam pengalokasian dana yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta sosial dan kesejahteraan. Jika digunakan secara efektif dan efisien, dana tersebut dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan layanan publik dan infrastruktur, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

1.3.2 Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas memperlihatkan nilai *probabilitas* F statistik sebesar $0,015 < 0,05$. Dari hasil nilai probabilitas pada pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa TKD dan PAD secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Artinya ada hubungan linier antara variabel independen (TKD dan PAD) terhadap variabel dependen (kemiskinan), jika adanya peningkatan pada Transfer Ke Daerah dan PAD maka dapat menurunkan kemiskinan. Dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan

bahwa nilai R² (R-square) adalah sebesar 0,607. Hal ini berarti besarnya pengaruh Transfer Ke Daerah dan PAD terhadap kemiskinan yaitu sebesar 60,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini misalnya seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta infrastruktur.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan apabila telah mencapai *maqasid al-shariah* (tujuan dari syariah). Pemenuhan *maqasid al-shariah* di suatu daerah dapat diukur melalui seberapa baik pendapatan daerah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar syariat Islam, yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks penggunaan pendapatan daerah, *maqasid al-shariah* dapat dianggap terpenuhi apabila:

1. Pendapatan daerah digunakan untuk Melindungi Agama (*Hifz al-Din*)
2. Pendapatan daerah digunakan untuk Melindungi Jiwa (*Hifz al-Nafs*)
3. Pendapatan daerah digunakan untuk Melindungi Akal (*Hifz al-Aql*)
4. Pendapatan daerah digunakan untuk Melindungi Keturunan (*Hifz al-Nasl*)
5. Pendapatan daerah digunakan untuk Melindungi Harta (*Hifz al-Mal*)

Menurut Imam Asy-Syathibi tujuan utama dari *maqasid al-shariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain:

1. Dharuriyat

Dharuriyat adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. Jika hal ini tidak ada, kehidupan di dunia akan menjadi rusak, kenikmatan akan hilang, dan manusia akan menghadapi siksaan di akhirat. Dharuriyat adalah kebutuhan paling dasar atau kebutuhan primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Dharuriyat terbagi menjadi lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Apabila kelima poin tersebut tidak terpenuhi dengan baik, hal ini akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Pidie, masyarakat disana sudah masuk kriteria memenuhi kebutuhan dharuriyat. Meskipun kemiskinan di Kabupaten Pidie relatif tinggi, masyarakat di sana masih dapat memenuhi kebutuhan dharuriyatnya. Mereka memiliki rumah untuk tempat tinggal dan kebun untuk bercocok tanam, yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi mungkin mereka dianggap miskin, tetapi dalam aspek dasar kehidupan seperti tempat tinggal dan sumber pangan,

mereka masih dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan primer mereka. Ini menunjukkan resiliensi dan kemampuan masyarakat Pidie untuk mengatasi tantangan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Kebutuhan daruriyat dari pemerintah untuk masyarakat merujuk pada kebutuhan yang sangat mendasar dan penting untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan dasar manusia. Ketiadaan pemenuhan kebutuhan ini dapat menyebabkan kerusakan besar atau bahaya bagi kehidupan. Di Kabupaten Pidie, aspek dharuriyat meliputi:

- a) Agama: Kebebasan beribadah dan fasilitas keagamaan yang memadai.
- b) Kehidupan: Kesehatan dan keselamatan jiwa, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar.
- c) Akal: Pendidikan dan akses informasi yang mendukung perkembangan intelektual.
- d) Keturunan: Perlindungan dan dukungan bagi keluarga serta kesehatan reproduksi.
- e) Harta: Kebutuhan ekonomi dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang layak.

Kebutuhan daruriyat ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi masyarakat, serta melindungi mereka dari risiko yang dapat menyebabkan kerusakan besar atau bahaya bagi kehidupan mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan ini

terpenuhi dengan cepat dan efektif, terutama dalam situasi darurat atau krisis.

2. Hajiyat

Hajiyat adalah kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Hajiyat termasuk kedalam kebutuhan sekunder dimana kebutuhan yang tidak mendasar tetapi penting untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup setelah kebutuhan primer terpenuhi, misalnya seperti transportasi pribadi, teknologi dan peralatan, rekreasi dan hiburan serta pakaian dan aksesoris. Untuk kebutuhan ini sebagian besar masyarakat sudah mendapatkannya dari pendapatan yang mereka peroleh walaupun tidak besar yang penting mereka dapat memenuhi kebutuhan membeli barang-barang yang diinginkan.

Kebutuhan hajiyat dari pemerintah untuk masyarakat merujuk pada layanan dan fasilitas yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Aspek hajiyat yang disediakan oleh pemerintah di Kabupaten Pidie meliputi:

- a) Transportasi: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta fasilitas transportasi umum.

- b) Komunikasi: Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet.
- c) Kesehatan: Penyediaan fasilitas kesehatan tambahan seperti klinik dan pusat kesehatan masyarakat.
- d) Pendidikan: Program pelatihan kerja dan kursus keterampilan.
- e) Perumahan: Program perbaikan dan pembangunan perumahan layak huni

Semua aspek di atas sudah terpenuhi meskipun tidak terpenuhi secara maksimal, contohnya seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menghubungkan daerah pedesaan dengan perkotaan untuk memudahkan akses transportasi, masih ada beberapa daerah yang kendala dengan kerusakan jalan. Teknologi dan Informasi seperti pembangunan jaringan internet di daerah terpencil, serta layanan publik seperti mudahnya akses ke layanan administrasi dan informasi pemerintah. Kebutuhan hajat ini bertujuan untuk memberikan keringanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan produktif.

3. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah tindakan melakukan kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan yang buruk sesuai

dengan pemahaman akal sehat. Tahsiniyah juga dikenal sebagai kebutuhan tersier yang berfungsi sebagai penghias kehidupan, memberikan kenikmatan hidup yang tergolong dalam kategori kemewahan, dan tingkatannya berada di atas kebutuhan dharuriyyat dan hajiyat. Kebutuhan ini biasanya tidak mendesak dan hanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, Kebutuhan tersier lebih berkaitan dengan keinginan dan simbol status sosial daripada kebutuhan mendasar.

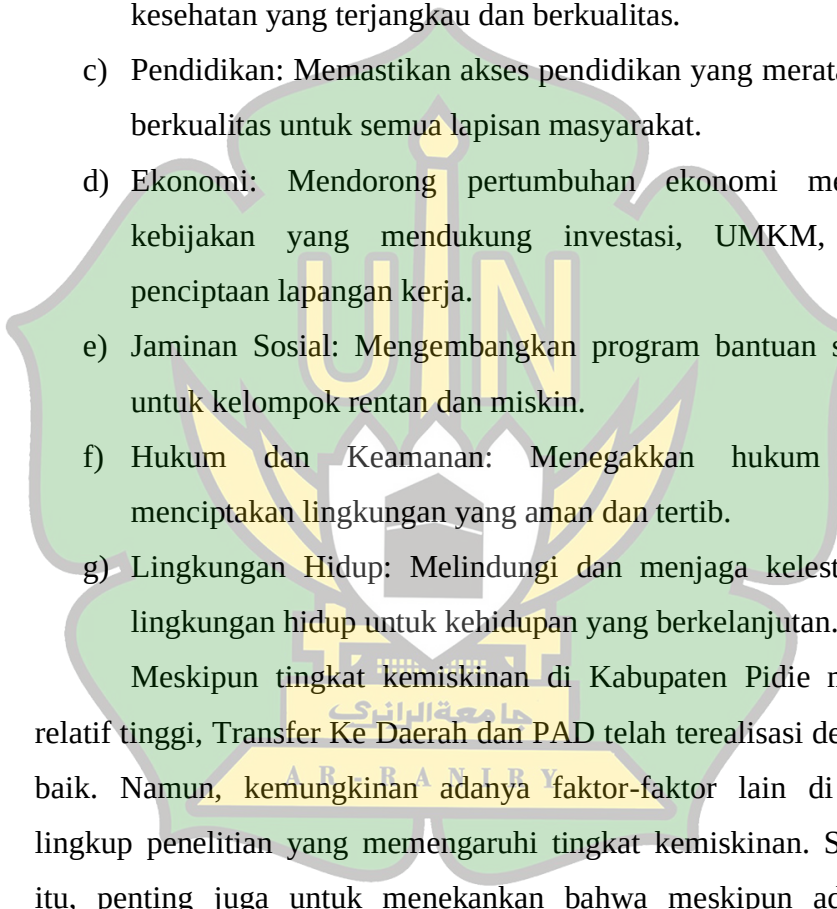
Kebutuhan tahsiniyah dari pemerintah kepada masyarakat adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong praktik-praktik yang mengarah pada kebiasaan baik serta menghindari kebiasaan buruk. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas publik yang meningkatkan kualitas hidup, promosi gaya hidup sehat, penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta memberikan insentif atau program-program yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku positif. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Aspek tahsiniat atau kebutuhan tersier yang disediakan oleh pemerintah di Kabupaten Pidie meliputi:

- a) Fasilitas Rekreasi dan Olahraga: Pembangunan taman, lapangan olahraga, dan pusat kebugaran.

- b) Kebudayaan dan Pariwisata: Pengembangan tempat wisata, museum, dan pusat kebudayaan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal.
- c) Kegiatan Sosial dan Komunitas: Dukungan untuk acara budaya, festival, dan kegiatan komunitas.
- d) Layanan Keamanan dan Kenyamanan: Peningkatan layanan keamanan publik seperti CCTV dan patroli keamanan.

Kebutuhan tahsiniyah ini bukan hanya tentang meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. Dengan memenuhi kebutuhan ini, pemerintah berkontribusi pada kesejahteraan umum dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi yang adil dan tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu, serta mengimplementasikan mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan antar masyarakat, sehingga dapat membantu dalam penurunan angka kemiskinan. Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki berbagai kebijakan, antara lain:

- 
- a) Penyediaan Infrastruktur: Membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik.
 - b) Pelayanan Kesehatan: Menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
 - c) Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.
 - d) Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung investasi, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
 - e) Jaminan Sosial: Mengembangkan program bantuan sosial untuk kelompok rentan dan miskin.
 - f) Hukum dan Keamanan: Menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
 - g) Lingkungan Hidup: Melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie masih relatif tinggi, Transfer Ke Daerah dan PAD telah terealisasi dengan baik. Namun, kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, penting juga untuk menekankan bahwa meskipun adanya hubungan ini, tetap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam faktor-faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Pidie. Artinya, meskipun ada kecenderungan bahwa peningkatan PAD dapat menurunkan tingkat kemiskinan, pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik untuk diandalkan sebagai faktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Namun demikian, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh suatu daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut berhasil dan mampu membangun pertumbuhan daerahnya secara mandiri. Daerah yang terus berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mengurangi tingkat pengangguran dan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian ini, semakin tinggi penerimaan PAD, semakin rendah persentase kemiskinan di Kabupaten Pidie.
2. Transfer Ke Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Pidie. Artinya, semakin besar transfer Transfer Ke Daerah yang

diterima dari pemerintah pusat semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Peningkatan Transfer Ke Daerah tidak hanya meningkatkan kapasitas finansial daerah, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie.

3. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Pidie dengan nilai signifikan 0,0157.
4. Penggunaan Transfer Ke Daerah dan PAD di Kabupaten Pidie sudah terealisasi dengan baik, meskipun tidak terealisasi secara maksimal. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, konsep masalah yang terdiri dari dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat telah terpenuhi.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pidie terhadap penurunan angka kemiskinan, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran untuk pihak yang berkepentingan dan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa saran dalam hal yang terkait:

1. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian diketahui jika variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie adalah realisasi Transfer Ke Daerah. Sehingga pemerintah diharapkan dapat memperhatikan pada sektor ini. Semakin tinggi penerimaan,

menandakan daerah telah mampu mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan tentunya dapat menurunkan angka kemiskinan.

2. Untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, disarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada pengalokasian dana yang tepat sasaran, terutama untuk program pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan Transfer Ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan pendekatan yang lebih komprehensif dan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Pidie. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana dan fokus pada faktor-faktor yang lebih dominan juga diperlukan untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., Rohmati, D., & Widiastuti, T. (2018). Maqāsid al-S harī ‘ ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295–317.
- APRIANTO, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188.
- Aprillyana, N. (2019). Estimasi Indikator Kemiskinan Tingkat Kecamatan Menggunakan Regresi Kekar M-Kuantil. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(2), 18.
- Arfiani, D. (2019). *Berantas Kemiskinan*. ALPRIN: Semarang, Jawa Tengah
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 26–35.
- Aris. (2023). *Pengertian Kemiskinan: Jenis, Penyebab dan Dampaknya*.
- Aryani, D. S., & Rachmawati, Y. (2019). Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang dengan Menggunakan Model Cibest. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 93–98.
- Azizah, D. S. N. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Perhitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021.
- Badan Pusat statistik Provinsi Aceh. (2023). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2014-2023.
- Damayanti, N. R. (2022). *Kemiskinan: Pengertian, Penyebab,*

hingga Jenis-jenisnya.

- Firdaus, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 53(9), 1689–1699.
- Gani, K. A. (2022). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat*. 1–65.
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342.
- Habibah, N. (2023). Kemiskinan Dalam Perspektif Al- Qur ' an. *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(1), 38–49.
- Hamdani. (2015). Kemiskinan Dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Study Islam Dan Sosial*, 9(2), 3–4.
- Imam, H. M., Mustain Nasoha, R. A. M., Nugroho, I. K., & Fanani, R. (2023). Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 5(1), 122–134.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Lasnawati, I., Arifin, W., & Hasanah, A. N. (2023). Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 2(2), 137–147.
- Lathifa, D. (2023). *Dana Perimbangan DBH Pajak: Pengertian &*

Alokasinya.

- Maria, E., Halim, A., & Luthfan, M. (2021). Dana Perimbangan Dan Pembangunan Manusia: Sebuah Bukti Pengujian Dari Pulau Kalimantan. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(3), 306.
- Marzuki. (2019). *Pembangunan Infrastruktur di Pidie Tidak Memiliki Izin Lingkungan.*
- Mustofa, M. F., & Utomo, T. (2023). Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili. *Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih*, 5, 1–17.
- Nadia, Y. (2023). *6 Dampak Kemiskinan Di Indonesia.*
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41.
- Nugroho, D., Asmanto, P., & Adji, A. (2020). Leading Indicators Kemiskinan Di Indonesia: Penerapan pada Outlook Jangka Pendek. *The Nasional Team For The Acceleration Of Poverty Reduction (TNP2K)*, 92(11), 1–36.
- Nurlela, M. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2019).* 2010, 19–40.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145–158.
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumat, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–10.

- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 31–44.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–2082.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1.
- Redaksi OCBC NISP. (2022). *Apa Itu Dana Perimbangan? Pengertian, Komponen & Alokasinya*.
- Retnawati, H. (2017). Pengantar Analisis Regresi dan Korelasi. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(1), 1–18.
- Rukmana, S. H., & Imaningsih², N. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2002-2021. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 826–833.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410.
- Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ulfah, N. (2021). *Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh)*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2, 10–17.
- Yonavilbia, E. (2023). *UMKM Pidie Terima Dana Bantuan Barang Rp7 sampai 100 Juta*.
- Zulkifli, M. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kota Palopo*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian

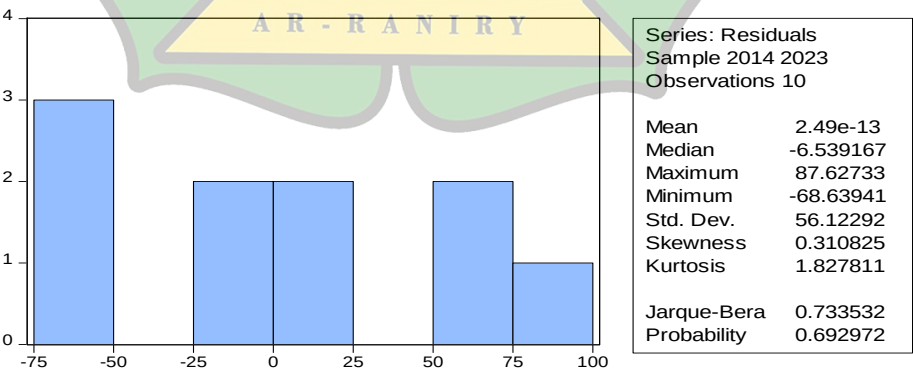
Tahun	Transfer Ke Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kemiskinan (%)
2014	1.121.517.646.919	166.598.922.670	20,29
2015	968.416.475.000	192.642.467.230	21,18
2016	1.136.572.837.480	249.489.453.840	21,25
2017	1.072.658.698.770	267.608.101.030	21,43
2018	1.098.033.955.150	237.201.958.010	20,47
2019	1.066.925.649.560	349.717.312.100	19,46
2020	1.791.132.340.970	219.573.681.840	19,23
2021	1.843.860.436.840	223.787.047.170	19,59
2022	1.734.883.467.900	225.594.481.380	18,79
2023	1.814.356.398.460	264.181.417.410	18,78

Sumber: Data diolah (2024)

Lampiran 2. Uji Multikolineritas

Variance Inflation Factors			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	18692.52	46.15756	NA
DP	3.24E-21	15.89279	1.009856
PAD	1.86E-19	27.37096	1.009856

Lampiran 3. Uji Normalitas



Lampiran 4. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.623595	Prob. F (5,4)	0.6946
Obs*R-squared	4.380426	Prob. Chi-Square (5)	0.4960
Scaled explained SS	0.888410	Prob. Chi-Square (5)	0.9711

Lampiran 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	3.623796	Prob. F (2,5)	0.1065
Obs*R-squared	5.917565	Prob. Chi-Square (2)	0.0519

Lampiran 6. Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: KMS				
Method: Least Squares				
Sample: 2014 2023				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2430.850	136.7206	17.77969	0.0000
DP	-2.22E-10	5.69E-11	-3.909934	0.0058
PAD	-5.12E-10	4.31E-10	-1.186609	0.2741
R-squared	0.694782	Mean dependent var		2004.700
Adjusted R-squared	0.607577	S.D. dependent var		101.5864
S.E. of regression	63.63741	Akaike info criterion		11.38761
Sum squared resid	28348.04	Schwarz criterion		11.47838
Log likelihood	-53.93803	Hannan-Quinn criter.		11.28802
F-statistic	7.967225	Durbin-Watson stat		1.537403
Prob(F-statistic)	0.015708			

Lampiran 7. Riwayat Hidup

Riwayat Hidup

Nama : Annisa Humaira
NIM : 200602108
Tempat/ Tgl. Lahir : Pidie/04 Desember 2002
Status : Belum Menikah
Alamat : Dayah Bubue, Kecamatan Peukan
Baro,

Kabupaten Pidie

No. Hp : 081375720039
Email : annisa041202@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2014
2. SMP : Lulus Tahun 2017
3. SMA : Lulus Tahun 2020
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Samsul Bahri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nurlali, S.Pd.I
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang tua : Dayah Bubue, Kecamatan Peukan baro,
Kabupaten Pidie